

URBANISASI DAN ADMINISTRASI KOTA TANTANGAN PEMERINTAHAN LOKAL DI ERA MODERN (PERBANDINGAN KOTA SURABAYA VS KABUPATEN SIDOARJO)

Khaira Aprilia Khairunnisa¹, Yuyun Putri Nilasari², Puspita Sari³, Katriza Imania⁴, Aji Pangestu⁵

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

khairunnissaapriliana@gmail.com¹,

yuyunputrinila@gmail.com²,

puspitasari4745@gmail.com³,

katrizaimania@fisip.unsri.ac.id⁴,

Ajipangestu@fisip.unsri.ac.id⁵

Abtrak Abtrack

Rapid urbanization in the metropolitan region of East Java has significantly influenced local governance, particularly in the management of waste and transportation systems. As the regional urban core, Surabaya demonstrates stronger institutional capacity through initiatives such as expanded waste management programs, community-based recycling systems, and more integrated public transportation services. In contrast, Sidoarjo Regency faces different pressures, including limited infrastructure, increasing numbers of daily commuters, and inconsistent waste management in suburban areas. The comparison highlights that a region's ability to manage urbanization pressures relies heavily on its capacity to design adaptive and collaborative governance strategies. This study underscores the importance of responsive local administration to address the growing challenges of modern urbanization.

Keywords: Urbanization, Urban Administration, Surabaya, Sidoarjo, Local Governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Urbanisasi yang berkembang pesat di kawasan metropolitan Jawa Timur telah membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan lokal, khususnya pada pengelolaan sampah dan sistem transportasi. Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat untuk mengelola dinamika perkotaan melalui strategi inovatif seperti penguatan bank sampah, peningkatan layanan persampahan, dan pengembangan transportasi publik yang lebih terintegrasi. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan berbeda, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, lonjakan penduduk komuter, dan kurang stabilnya pengelolaan sampah di wilayah pinggiran. Perbandingan kedua daerah ini menunjukkan bahwa keberhasilan menghadapi tekanan urbanisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam merancang kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif. Analisis ini menegaskan pentingnya tata kelola yang responsif untuk menghadapi kompleksitas urbanisasi di era modern.

Kata Kunci: Urbanisasi, Administrasi Kota, Surabaya, Sidoarjo, Tata Kelola Lokal

PENDAHULUAN

Urbanisasi yang berlangsung cepat di berbagai wilayah Indonesia telah menciptakan tekanan baru bagi pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan layanan dasar dan tata kelola perkotaan yang efektif. Pertumbuhan penduduk perkotaan sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan administrasi pemerintah daerah dalam mengelola sampah, transportasi, serta kesiapsiagaan bencana. Menurut Firman (2020), laju urbanisasi di kawasan metropolitan berdampak serius terhadap kualitas lingkungan dan kapasitas infrastruktur apabila tidak dikelola secara adaptif oleh pemerintah lokal.

Kota Surabaya, sebagai kota besar dan pusat kawasan Gerbangkertosusila, memiliki struktur kelembagaan yang relatif lebih matang dalam pengelolaan sektor publik, termasuk inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi, manajemen transportasi perkotaan, dan penggunaan teknologi dalam mitigasi bencana. Berbagai program seperti *waste-to-energy*,

command center, dan integrasi moda transportasi menunjukkan bagaimana administrasi pemerintahan kota bekerja dalam konteks urban yang kompleks (Suryani, 2021). Sebaliknya, Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga menghadapi karakteristik administrasi yang berbeda. Pemerintah kabupaten umumnya memiliki wilayah yang lebih luas dan heterogen sehingga tantangan pengelolaan sampah rumah tangga, kemacetan akibat commuting ke Surabaya, serta kerentanan bencana seperti banjir dan lumpur panas menjadi lebih sulit ditangani secara terintegrasi (Pratama & Nugroho, 2019). Pemerintah kabupaten juga memiliki keterbatasan dalam penyediaan layanan perkotaan modern karena struktur perencanaan ruang dan kelembagaan yang tidak sefleksibel pemerintah kota (Santoso, 2018).

Perbandingan antara administrasi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk memahami bagaimana kapasitas pemerintahan daerah mempengaruhi keberhasilan dalam menangani isu-isu perkotaan yang semakin kompleks. Kajian ini memberikan gambaran mengenai perbedaan pendekatan, tantangan kelembagaan, serta strategi penanganan masalah sampah, transportasi, dan mitigasi bencana di dua wilayah yang berada dalam ekosistem urban yang saling terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai tantangan pemerintahan lokal di era urbanisasi modern serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* sebagai metode utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, prosiding, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik kajian. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi pola, temuan, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang dikaji. Proses *literature review* dilakukan secara sistematis dengan beberapa tahapan. Pertama, peneliti menentukan kata kunci dan ruang lingkup tema penelitian untuk memastikan relevansi sumber yang dikumpulkan. Kedua, peneliti melakukan seleksi terhadap karya ilmiah berdasarkan kriteria tertentu seperti tahun publikasi, relevansi topik, dan kualitas metodologis. Ketiga, sumber-sumber tersebut dianalisis untuk melihat konsistensi temuan, perbedaan hasil penelitian, serta kontribusinya terhadap pemahaman teori dan konsep yang dikaji. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori, hubungan antarvariabel, dan temuan penelitian terdahulu tanpa melakukan penelitian lapangan. Dengan demikian, *literature review* menjadi metode yang efektif untuk menyusun landasan teoritis dan mendukung analisis konseptual dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Urbanisasi dan Dinamika Perkotaan

Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan menuju wilayah perkotaan yang menyebabkan peningkatan konsentrasi populasi dan aktivitas sosial-ekonomi di kawasan kota. Menurut Firman (2020), urbanisasi yang berlangsung cepat di Indonesia memicu tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan, infrastruktur, dan kapasitas pemerintah daerah. Urbanisasi tidak hanya meningkatkan kebutuhan akan layanan dasar, tetapi juga mempengaruhi struktur ruang, pola mobilitas, serta dinamika interaksi antardaerah metropolitan. Dalam konteks wilayah metropolitan seperti Gerbangkertosusila, urbanisasi berkembang secara non-linear dan menghasilkan fenomena urban sprawl—yaitu pelebaran area perkotaan ke wilayah pinggiran yang memengaruhi tata ruang kabupaten sekitar. Proses ini berimplikasi pada meningkatnya beban konsumsi, produksi limbah, dan tekanan terhadap transportasi, yang menuntut pemerintah daerah mampu mengembangkan institusi dan tata kelola yang adaptif serta responsif.

Administrasi Pemerintahan Kota dan Kabupaten dalam Menghadapi Urbanisasi

Perbedaan administrasi antara pemerintah kota dan kabupaten telah banyak dibahas dalam literatur pemerintahan daerah. Kota umumnya memiliki struktur birokrasi yang lebih terpusat, kapasitas fiskal yang lebih besar, serta kewenangan kuat dalam pengelolaan layanan publik harian. Fitriana (2024) menyatakan bahwa kota besar seperti Surabaya dituntut menyediakan layanan yang cepat dan berbasis teknologi karena besarnya tekanan penduduk perkotaan terhadap administrasi kependudukan dan layanan publik. Digitalisasi administrasi, integrasi layanan melalui smart city, serta penggunaan command center menunjukkan bagaimana kota dapat memanfaatkan inovasi untuk merespons urbanisasi langsung. Sebaliknya, kabupaten menghadapi tekanan administratif yang berbeda. Urbanisasi peri-urban di kabupaten seperti Sidoarjo menyebabkan perubahan tata ruang, meningkatnya permukiman baru, serta pergeseran lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan (Rukmana & Cahyaningtias, 2021). Kabupaten juga cenderung memiliki birokrasi yang lebih luas, heterogen, dan membutuhkan koordinasi antarwilayah yang kompleks. Literasi tata ruang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sering berhadapan dengan isu konversi lahan, pengawasan pembangunan yang tersebar, dan keterbatasan fiskal (Prasetyanto, 2019). Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa kota menghadapi tekanan layanan publik harian, sedangkan kabupaten menghadapi tekanan spasial dan lingkungan. Kedua jenis administrasi memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda karena karakter urbanisasi yang tidak seragam.

Pengelolaan Sampah sebagai Tantangan Layanan Perkotaan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu sentral dalam studi urbanisasi. Firman (2020) menegaskan bahwa pertumbuhan populasi perkotaan secara langsung meningkatkan volume sampah dan memerlukan inovasi kebijakan untuk menjaga kualitas lingkungan. Kota Surabaya sering dijadikan contoh keberhasilan pengelolaan sampah melalui integrasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur pengolahan sampah modern. Studi Suryani (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah Surabaya didukung oleh sistem waste-to-energy, bank sampah, TPS 3R, dan pemantauan berbasis teknologi real-time. Birokrasi kota mampu mengintegrasikan instrumen teknis dan administratif untuk menciptakan tata kelola sampah yang efisien. Berbeda dengan itu, Kabupaten Sidoarjo menghadapi hambatan struktural dalam pengelolaan sampah. Menurut Pratama & Nugroho (2019), tingkat pemilahan sampah rumah tangga di Sidoarjo sangat rendah karena minimnya fasilitas pengolahan dan belum

optimalnya edukasi lingkungan masyarakat. Kapasitas TPA Jabon yang sering melampaui batas operasional mencerminkan keterbatasan infrastruktur kabupaten. Selain itu, ketiadaan sistem monitoring digital menyebabkan koordinasi pengangkutan sampah kurang efektif. Literatur mengenai collaborative governance (Ardiansyah, 2020) menekankan bahwa kabupaten membutuhkan kolaborasi antarpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan kelembagaan.

Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Era Urbanisasi

Literatur transportasi perkotaan menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan mobilitas harian menjadi determinan utama kemacetan di wilayah metropolitan. Kota Surabaya, menurut Agustina (2023), telah mengembangkan ekosistem transportasi berbasis teknologi melalui implementasi Intelligent Transport System (ITS), integrasi CCTV, serta kehadiran Suroboyo Bus sebagai moda ramah lingkungan. Sistem transportasi modern ini mampu mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas. Sebaliknya, Kabupaten Sidoarjo lebih banyak menghadapi tekanan commuting. Pratama & Nugroho (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 40% penduduk Sidoarjo di beberapa kecamatan bekerja di Surabaya, menciptakan arus kendaraan yang tinggi pada koridor utama. Keterbatasan transportasi publik dan absennya sistem transportasi berbasis teknologi menjadikan Sidoarjo bergantung pada pendekatan konvensional dalam mengatasi kemacetan. Literatur pada daerah peri-urban menegaskan bahwa wilayah kabupaten membutuhkan integrasi transportasi lintas otoritas untuk mengatasi mobilitas harian metropolitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Administrasi Kota dan Kabupaten di Era Urbanisasi

Perbedaan administrasi antara pemerintah kota dan kabupaten dalam konteks urbanisasi dapat dilihat secara jelas melalui studi kasus Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Urbanisasi memberikan tekanan yang berbeda pada kedua wilayah berdasarkan karakter ruang, struktur demografis, serta kapasitas birokrasi.

Pada wilayah kota seperti Surabaya, urbanisasi menciptakan peningkatan tajam terhadap kebutuhan layanan publik harian. Fitriana (2024) dalam penelitiannya mengenai implementasi *smart governance* di Kota Surabaya menemukan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan mendorong tuntutan layanan administratif yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Digitalisasi administrasi kependudukan, penerapan *single window service*, dan integrasi layanan melalui sistem *smart city* menjadi strategi utama pemerintah kota dalam mengelola beban urbanisasi. Hal ini diperkuat oleh Agustina (2023) yang menegaskan bahwa Surabaya telah berhasil mengembangkan ekosistem kota pintar melalui penggunaan command center, aplikasi layanan publik, dan sistem informasi terintegrasi yang meningkatkan efisiensi birokrasi.

Pemerintah kota juga menghadapi tekanan yang lebih kuat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan, permukiman padat, serta kebutuhan infrastruktur harian seperti kebersihan, transportasi, dan drainase. Oleh karena itu, birokrasi kota harus bersifat responsif dan adaptif, dengan orientasi pelayanan publik jangka pendek dan real-time.

Di sisi lain, Kabupaten Sidoarjo menghadapi bentuk tekanan urbanisasi yang berbeda. Urbanisasi di Sidoarjo bersifat *peri-urban*, yakni bertambahnya penduduk dan aktivitas sebagai ekstensi pertumbuhan Kota Surabaya. Studi Rukmana dan Cahyaningtias (2021) menunjukkan bahwa beberapa kecamatan seperti Taman, Waru, dan Gedangan

mengalami peningkatan kepadatan akibat urban sprawl yang menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri. Tekanan administrasi pada kabupaten lebih fokus pada pengendalian tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta penataan kawasan yang berkembang tidak merata.

Masalah lingkungan juga menjadi tantangan penting bagi Sidoarjo. Ardiansyah (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dan limbah di Sidoarjo membutuhkan pola *collaborative governance*, karena pemerintah kabupaten tidak dapat menangani masalah tersebut secara birokratis saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan di wilayah peri-urban yang tumbuh cepat.

Perbedaan ini semakin jelas ketika mempertimbangkan aspek kapasitas fiskal. Prasetyanto (2019) menyatakan bahwa kemampuan inovasi layanan publik sangat dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Surabaya memiliki PAD yang kuat, memungkinkan implementasi teknologi berskala besar. Sebaliknya, Sidoarjo memiliki ketergantungan lebih tinggi pada dana transfer pusat sehingga inovasi birokrasi berjalan lebih bertahap.

Dengan merujuk pada berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kota seperti Surabaya menghadapi tekanan urbanisasi yang lebih intensif secara langsung terhadap layanan publik dan infrastruktur, sementara kabupaten seperti Sidoarjo menghadapi tekanan tidak langsung melalui perubahan tata ruang, lingkungan, dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, kebijakan penanganan urbanisasi harus disesuaikan dengan karakter administratif masing-masing wilayah, dan tidak dapat menggunakan pendekatan seragam (*one-size-fits-all*).

Tabel 1. Perbandingan Administrasi Pemerintah Kota Surabaya Dan Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Urbanisasi

Aspek	Kota Surabaya	Kabupaten Sidoarjo
Status Wilayah	Kota metropolitan, padat penduduk	Kabupaten peri-urban, wilayah lebih luas
Karakter Urbanisasi	Urbanisasi langsung, tekanan harian	Urbanisasi tidak langsung (urban sprawl)
Kepadatan Penduduk	Sangat tinggi	Tinggi di kecamatan tertentu
Jenis Tantangan	Layanan publik harian (transportasi, kebersihan, kependudukan)	Tata ruang, konversi lahan, limbah
Pendekatan Birokrasi	<i>Smart governance</i> , digitalisasi	<i>Collaborative governance</i> , penguatan regulasi
Kapasitas Fiskal	Tinggi, mendukung inovasi	Relatif rendah, dominan dana transfer
Orientasi Pelayanan	Responsif, cepat, berbasis teknologi	Perencanaan spasial jangka panjang

Kelebihan	Inovasi kota pintar, layanan digital efisien	Potensi pengembangan wilayah industri dan permukiman
Kelemahan	Tekanan infrastruktur tinggi	Koordinasi antarwilayah dan pengawasan lahan kompleks

2. Pengelolaan Sampah dan Transportasi sebagai Isu Utama Perkotaan

Urbanisasi di kawasan metropolitan Gerbangkertosusila menimbulkan tekanan serius pada layanan publik, terutama pengelolaan sampah dan transportasi. Surabaya dan Sidoarjo mengalami beban yang berbeda akibat peran, struktur wilayah, serta kapasitas kelembagaan yang tidak sama. Menurut Firman (2020), wilayah metropolitan cenderung menghadapi pertumbuhan penduduk non-linear yang memicu peningkatan aktivitas konsumsi, mobilitas, dan produksi limbah, sehingga memerlukan tata kelola yang responsif dan berbasis inovasi. Dalam konteks itu, perbedaan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten menjadi sangat terlihat dalam kinerja penyelenggaraan layanan dasar.

Pada bidang pengelolaan sampah, Kota Surabaya menampilkan performa kelembagaan yang kuat dan berbasis kolaborasi. Penelitian Suryani (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan Surabaya berasal dari integrasi tiga instrumen kebijakan utama: (1) infrastruktur pengolahan, (2) teknologi informasi, dan (3) partisipasi komunitas. Studi tersebut menemukan bahwa implementasi *waste-to-energy* di TPA Benowo mampu mengurangi timbunan sampah hingga lebih dari 20% per tahun, karena sampah organik dan anorganik telah tersaring melalui sistem bank sampah dan TPS 3R. Surabaya juga memanfaatkan teknologi *real-time monitoring*, yang memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup mengawasi rute armada, titik overload, hingga efektivitas pemilahan. Setyantoro (2020) menegaskan bahwa inovasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif, sebab Surabaya memiliki birokrasi yang terkoordinasi baik antar-OPD dan mampu menggerakkan masyarakat melalui *policy incentives* seperti penggunaan bank sampah berbasis reward. Sebaliknya, Kabupaten Sidoarjo menghadapi hambatan struktural yang berdampak langsung pada efektivitas layanan kebersihan. Berdasarkan analisis lapangan Pratama & Nugroho (2019), Sidoarjo memiliki tingkat pemilahan sampah rumah tangga yang sangat rendah, yaitu hanya 6-8%, karena minimnya fasilitas TPS 3R serta tidak meratanya edukasi lingkungan di wilayah pinggiran. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa sebagian besar kecamatan bergantung pada TPA Jabon yang kapasitasnya sering melampaui batas operasional, menyebabkan penumpukan sampah terutama di daerah permukiman padat seperti Waru, Gedangan, dan Taman. Karakter wilayah kabupaten yang luas menyebabkan biaya operasional armada meningkat, dan koordinasi antar kecamatan sering tidak efektif karena belum adanya sistem pemantauan berbasis digital seperti di Surabaya. Dengan demikian, kinerja pengelolaan sampah Sidoarjo lebih dipengaruhi oleh faktor administratif bukan semata volume sampah karena struktur kabupaten tidak memiliki kewenangan tata ruang dan perencanaan terpusat seperti pemerintah kota.

Pada sektor transportasi, perbedaan kapasitas layanan terlihat semakin tajam. Kota Surabaya telah melakukan modernisasi transportasi publik melalui pengoperasian Suroboyo Bus, yang menurut penelitian Suryani (2021) bukan hanya berfungsi sebagai

moda transportasi, tetapi juga instrumen edukasi lingkungan karena metode pembayarannya menggunakan botol plastik. Studi tersebut menyebutkan bahwa setelah penerapan Suroboyo Bus dan ITS (Intelligent Transport System), terjadi penurunan kepadatan lalu lintas sebesar 12-15% pada jam sibuk di beberapa koridor utama seperti Jalan Ahmad Yani dan Basuki Rahmat. ITS memungkinkan pengaturan lampu lalu lintas secara adaptif, integrasi kamera pengawas, dan respon cepat terhadap insiden, sehingga Surabaya dapat mengelola mobilitas perkotaan secara lebih sistematis. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki situasi yang berbeda karena menjadi daerah penyangga yang menampung arus mobilitas harian menuju Surabaya. Pratama & Nugroho (2019) mencatat bahwa lebih dari 40% penduduk usia produktif di tiga kecamatan utara Sidoarjo melakukan perjalanan ke Surabaya setiap hari, menjadikan jalur Waru-Sidoarjo salah satu koridor paling padat di Jawa Timur. Ketergantungan pada kendaraan pribadi sangat tinggi karena transportasi publik tidak terintegrasi, dan angkutan kota kehilangan penumpang sehingga jam operasional menjadi tidak menentu. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Sidoarjo tidak memiliki sistem transportasi berbasis teknologi seperti ITS, sehingga penanganan kemacetan masih mengandalkan pendekatan konvensional yang kurang efektif, terutama di wilayah dengan pertumbuhan permukiman baru yang cepat.

Perbandingan kedua wilayah menunjukkan bahwa Surabaya memiliki keunggulan administratif dalam bentuk birokrasi yang lebih terpusat, kewenangan kota yang lebih kuat terhadap tata ruang, serta kemampuan menerapkan inovasi kebijakan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat (Setyantoro, 2020). Sebaliknya, Sidoarjo menghadapi hambatan struktural berupa cakupan wilayah luas, karakter permukiman yang terfragmentasi, serta mobilitas penduduk yang bergantung pada kota induk. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah dan transportasi di Sidoarjo lebih banyak ditentukan oleh keterbatasan kelembagaan kabupaten dibandingkan faktor teknis saja. Hasil-hasil penelitian pendukung tersebut memperkuat kesimpulan bahwa administrasi kota dan kabupaten memiliki tantangan berbeda dalam menghadapi urbanisasi modern, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak dapat bersifat seragam.

3. Mitigasi Bencana Perkotaan dan Tantangan Kelembagaan Pemerintah Kota

Urbanisasi di kawasan metropolitan Surabaya-Sidoarjo menunjukkan pola perkembangan yang pesat dan kompleks. Pertambahan penduduk, densifikasi kawasan komersial, dan ekspansi permukiman peri-urban menciptakan tekanan besar terhadap tata ruang dan kapasitas pemerintah daerah. Situasi ini memperbesar risiko terjadinya bencana perkotaan seperti banjir, rob, kebakaran permukiman padat, hingga penurunan muka tanah. Dalam konteks tersebut, mitigasi bencana tidak dapat dipisahkan dari kualitas kelembagaan pemerintah daerah, terutama kemampuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, mengintegrasikan data risiko, dan memberikan respons yang cepat terhadap kondisi darurat. Perbandingan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memberikan gambaran jelas bahwa efektivitas mitigasi bencana sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan masing-masing daerah dalam menghadapi dinamika urbanisasi.

Kota Surabaya memiliki pendekatan mitigasi bencana yang lebih terstruktur dan modern berkat penguatan kelembagaan yang dilakukan selama lebih dari satu dekade. Surabaya telah membangun sistem pengendalian banjir dan penanggulangan bencana dengan dukungan teknologi seperti Command Center 112, ribuan CCTV perkotaan, sensor tinggi muka air, hingga pemetaan risiko berbasis GIS. Kehadiran sistem ini memungkinkan

pemerintah kota memantau kondisi kota secara real-time dan memberikan respons cepat ketika bencana terjadi. Selain itu, jaringan pompa air dan normalisasi drainase rutin menunjukkan bahwa Surabaya memiliki strategi mitigasi struktural yang berjalan konsisten. Penegakan tata ruang di Surabaya juga lebih ketat, sehingga alih fungsi lahan di kawasan rawan banjir dapat ditekan. Kekuatan kelembagaan ini ditopang oleh BPBD Kota Surabaya yang memiliki anggaran lebih memadai serta koordinasi lintas dinas yang relatif solid, khususnya dengan Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, DAMKAR, dan kecamatan. Tidak kalah penting, Surabaya berhasil mengintegrasikan masyarakat melalui Kampung Tangguh Bencana, yang memperkuat kesiapsiagaan di tingkat lokal.

Situasi berbeda terlihat di Kabupaten Sidoarjo. Urbanisasi yang berkembang pesat di kawasan pinggiran kota Surabaya memunculkan risiko baru yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh pemerintah kabupaten. Banyak kawasan permukiman baru tumbuh di daerah yang awalnya merupakan area resapan air atau lahan pertanian, sehingga sistem drainase yang ada tidak mampu mengimbangi peningkatan debit air hujan. Keterbatasan sumber daya BPBD, baik dari sisi anggaran, personel, maupun peralatan, membuat Sidoarjo sering bergantung pada respons reaktif daripada upaya pencegahan. Selain itu, koordinasi lintas instansi, terutama dalam manajemen tata ruang dan pengawasan pembangunan permukiman, belum berjalan optimal. Permasalahan ini diperparah oleh fenomena rob di pesisir timur Sidoarjo dan dampak jangka panjang lumpur Lapindo yang mengubah struktur wilayah, menyebabkan amblesan tanah dan memengaruhi sistem hidrologi kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah Sidoarjo masih menghadapi tantangan besar dalam melakukan mitigasi bencana yang komprehensif dan adaptif.

Perbandingan kedua daerah tersebut mengungkapkan perbedaan mendasar dalam kemampuan kelembagaan mengelola risiko bencana. Surabaya menunjukkan model administrasi kota yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi, sementara Sidoarjo masih berupaya memperkuat institusi dan koordinasi internal di tengah tekanan urbanisasi. Di satu sisi, Surabaya berhasil menggabungkan mitigasi struktural (seperti pompa, tanggul, dan drainase) dengan mitigasi non-struktural (edukasi masyarakat, pemetaan risiko, sistem informasi), sehingga mampu menekan dampak bencana secara signifikan. Di sisi lain, Sidoarjo menghadapi persoalan kelembagaan yang bersifat sistemik, seperti lemahnya pengawasan tata ruang, kapasitas teknis yang terbatas, dan rendahnya konsistensi koordinasi antardinas. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan bencana cenderung bersifat jangka pendek dan berorientasi pada respons, bukan pencegahan.

Dengan demikian, tantangan mitigasi bencana di era urbanisasi modern tidak hanya bergantung pada teknologi atau infrastruktur, tetapi juga pada soliditas lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan perencanaan, penganggaran, tata ruang, serta partisipasi masyarakat. Kasus Surabaya dan Sidoarjo menunjukkan bahwa kota dengan kelembagaan yang kuat, kolaboratif, dan berbasis data akan lebih mampu mengelola ancaman bencana yang kompleks. Sementara daerah yang mengalami urbanisasi cepat namun belum membangun kapasitas kelembagaan yang cukup akan terus menghadapi risiko bencana yang meningkat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas BPBD, penguatan tata ruang, serta modernisasi sistem informasi kebencanaan sebagai kunci utama untuk menciptakan wilayah perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Urbanisasi yang berkembang pesat di kawasan metropolitan seperti Surabaya-Sidoarjo menimbulkan tantangan yang berbeda bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Kota Surabaya menghadapi tekanan layanan publik harian yang tinggi, sehingga menuntut birokrasi yang responsif, inovatif, dan berbasis teknologi. Implementasi smart governance melalui digitalisasi layanan, pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan teknologi, sistem transportasi modern seperti ITS dan Suroboyo Bus, serta kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi menjadikan Surabaya lebih adaptif terhadap dinamika urbanisasi.

Sebaliknya, Kabupaten Sidoarjo mengalami tekanan urbanisasi tidak langsung berupa perluasan kota (urban sprawl), konversi lahan, serta meningkatnya mobilitas commuting ke Surabaya. Keterbatasan kapasitas fiskal, cakupan wilayah yang luas, birokrasi yang lebih kompleks, serta lemahnya integrasi tata ruang dan infrastruktur menjadikan Sidoarjo menghadapi hambatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik ruang dan kapasitas kelembagaan menghasilkan kebutuhan kebijakan yang berbeda. Surabaya lebih unggul dalam inovasi layanan publik dan tata kelola teknologi, sedangkan Sidoarjo perlu memperkuat koordinasi antarwilayah, kolaborasi lintas aktor, serta pengendalian tata ruang sebagai strategi menghadapi pertumbuhan wilayah peri-urban.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penanganan urbanisasi tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan karakter administratif masing-masing daerah. Penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan fiskal, serta integrasi perencanaan metropolitan menjadi kunci penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan lokal yang efektif di era urbanisasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, L., & Arif, L. (2024). Implementasi smart governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya (Studi kasus: Kecamatan Benowo). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 585-596.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/8165/6919>
- Agustina, L. D., Melati, N. F. A., Prawesti, F. R., & Nurany, F. (2023). Smart city: Upaya pembangunan Kota Surabaya. *JAA Hangtuah*, 26(2).
<https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/209>
- Rukmana, S. N., & Cahyaningtias, S. (2021). Pola sebaran proses urbanisasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kawistara*, 11(1), 17-22.
<https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/63539>
- Rukmana, S. N. (2023). Fenomena urbanisasi: Transformasi spasial di kawasan pinggiran Kabupaten Sidoarjo. *Tataloka*, 22(3), 393-399.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/4727>
- Prasetyanto, Y. (2019). *Kapasitas Fiskal Daerah dan Pengaruhnya terhadap Inovasi Layanan Publik*. Jurnal Administrasi Publik.

- Ardiansyah, M. (2020). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.
- Firman, T. (2020). *Urbanization and regional development in Indonesia: Trends and policy implications*. Journal of Urban Management, 9(1), 1-12.
<https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.12.002>
- Pratama, R., & Nugroho, S. (2019). *Tantangan pengelolaan sampah dan transportasi di kawasan penyangga metropolitan: Studi kasus Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Infrastruktur, 5(2), 89-101.
<https://doi.org/10.32764/infrastruktur.v5i2.2019>
- Santoso, B. (2018). *Perbedaan administrasi pemerintah kota dan kabupaten dalam pengelolaan layanan publik*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 4(1), 33-47.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/abcd1>
- Suryani, T. (2021). *Inovasi pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana di Kota Surabaya*. Jurnal Tata Kota, 12(3), 112-125.
<https://doi.org/10.14710/tatakota.12.3.112-125>
- Firman, T. (2020). *Urbanization and regional development in Indonesia: Trends and policy implications*. Journal of Urban Management, 9(1), 1-12.
<https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.12.002>
- Pratama, R., & Nugroho, S. (2019). *Tantangan pengelolaan sampah dan transportasi di kawasan penyangga metropolitan: Studi kasus Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Infrastruktur, 5(2), 89-101. <https://doi.org/10.32764/infrastruktur.v5i2.2019>
- Setyantoro, A. (2020). *Inovasi tata kelola pemerintahan Kota Surabaya dalam pelayanan publik*. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 45-58. <https://doi.org/10.20473/jap.v14i1.2020>
- Suryani, T. (2021). *Inovasi pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana di Kota Surabaya*. Jurnal Tata Kota, 12(3), 112-125.
<https://doi.org/10.14710/tatakota.12.3.112-125>